



Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Analysis of Budget Planning and Evaluation in Improving Regional Government Performance Singkil Aceh District **Teuku Rully Hendrawan ¹⁾, Marlon Sihombing ²⁾ & Maksum Syahri Lubis^{1)*}**

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan dan evaluasi anggaran dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan evaluasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran, terutama perencanaan keuangan, pengumpulan data yang paling akhir untuk evaluasi kinerja serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan anggaran. Faktor kendala dalam perencanaan adalah terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya, dan kebutuhan uang persediaan untuk periode satu bulan tidak direncanakan dengan baik. Sedangkan faktor kendala dalam evaluasi kinerja, data atau informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa tahapan kegiatan yang dilaksanakan belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi.

Kata Kunci: Perencanaan; Evaluasi; Anggaran; Kinerja

Abstract

This study aims to determine and analyze budget planning and evaluation in improving the performance of the Aceh Singkil District Government, and to find out and analyze the obstacles faced in planning and evaluating budgets in improving the performance of the Aceh Singkil District Government. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used through interviews and observation. Data analysis techniques used in this study are qualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that budget planning and evaluation in the Aceh Singkil District Government has not fully been able to improve budget performance, especially financial planning, the most recent data collection for performance evaluation and efforts to overcome budget constraints. The obstacle factor in planning is that there is a tendency to reduce budget allocations for certain activities with the aim that the available budget can be allocated to various other programs, and the inventory money requirement for a one-month period is not well planned. Whereas the constraints in the performance evaluation, data or information available have not fully been able to show the most recent conditions, because there is a possibility that the stages of activities carried out have not been reported, or there is a possibility that the evidence of expenditure has not been recorded because it still can be administered.

Keywords: Planning; Evaluation, Budget; Performance.

How to Cite: Hendrawan, T.R., Sihombing, M., & Lubis, M.S. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 65-74.

* Email: maksum@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan atau perencanaan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan pelaksanaan anggaran sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang belum optimal sehingga berakibat pada rendahnya kinerja organisasi, yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah dimana pemerintah daerah sebagai penerima wewenang dalam mengelola organisasi perlu melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian kinerja organisasi yang baik. Agar tidak terjadi permasalahan - permasalahan dalam menjalankan kewajibannya khususnya yang terkait dengan permasalahan anggaran.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran (Subiyantoro, 2011). Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan anggaran. Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah daerah.

Evaluasi anggaran juga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perencanaan dan evaluasi pada dasarnya mempunyai kaitan yang sangat erat, karena proses evaluasi akan memungkinkan tercapainya rencana, atau sebaliknya, proses evaluasi perlu memperbaiki rencana lebih lanjut, tergantung pada hal-hal apa yang ditemukan menjadi kendala pada tahap

pelaksanaan anggaran. Begitu suatu rencana memasuki tahap pelaksanaan, maka tidak mudah untuk menghentikan sama sekali karena berdampak pada kerugian keuangan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, peranan evaluasi pada program kerja yang telah dilaksanakan akan sangat penting untuk mengatasi kendala pelaksanaan yang ditemukan di lapangan, sehingga kegiatan tersebut benar-benar dapat dilanjutkan hingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Dari pengamatan penulis bahwa kinerja pemerintah di daerah tersebut belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Penelitian dilakukan pada Kantor Bupati Aceh Singkil, yang berkedudukan di Pulo Sarok, Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian dilakukan dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2019.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebanyak 4 orang yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Perencanaan Anggaran

Rencana pengeluaran di masa depan sesuai dengan ketersediaan dana, yang bisa digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Indikator yang digunakan adalah rapat koordinasi, penyusunan RKA-SK dan perencanaan keuangan.

2. Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja aparat. Indikator yang digunakan adalah persiapan evaluasi kinerja, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis kinerja dan disposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi merupakan forum perencanaan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan RKA-L/K, yang tujuannya adalah membicarakan dan memutuskan usulan kegiatan anggaran yang terkait dengan program kerja. Rapat koordinasi dalam perencanaan kegiatan biasanya dilakukan akhir tahun untuk rencana anggaran tahun berikutnya, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. Rapat koordinasi harus dapat menghimpun dan mempertimbangkan semua informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana. Dengan adanya rapat koordinasi penyusunan anggaran maka diharapkan masing-masing unit organisasi segera memahami program kerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan, yang tentu saja berdampak pada tingkat penyerapan anggaran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja, dengan mengundang berbagai pihak yang berkepentingan seperti kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen. Terdapat kewajiban agar semua pihak yang diundang menghadiri rapat koordinasi sehingga rencana kerja anggaran yang ditetapkan dapat memenuhi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Kehadiran semua pihak diharapkan akan menyamakan pemahaman dalam pelaksanaannya, sehingga kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Rapat koordinasi telah mampu menghimpun semua data yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana. Unit-unit organisasi yang akan melakukan kegiatan telah mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengajuan rencana kegiatan. Dengan adanya dukungan informasi dari lapangan maka rencana kegiatan yang diajukan akan lebih mudah untuk dimasukkan dalam rencana kerja anggaran. Dengan demikian bahwa rencana kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah sinkron dengan kondisi lapangan, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan, yang berarti akan meningkatkan penyerapan anggaran.

2. Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

Langkah perencanaan yang sangat penting setelah penyediaan atau pengumpulan informasi adalah penyusunan rencana. Tahapan penyusunan rencana kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian hasil wawancara disimpulkan bahwa penyusunan rencana anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah menerapkan prinsip skala prioritas. Jika rencana kegiatan mendahulukan program yang benar-benar segera dibutuhkan, maka pelaksanaan kegiatan tersebut akan mendapat dukungan dari banyak pihak, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih lancar, yang berarti juga akan meningkatkan kinerja penyerapan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah didasarkan pada kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Suatu kegiatan hanya dimasukkan dalam RKA apabila kondisi lapangan sangat mendukung, sehingga peran petugas atau pegawai dalam mengkoordinasi kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

3. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan dalam hal ini adalah menetapkan besarnya pagu anggaran yang disediakan bagi setiap kegiatan. Penyediaan anggaran yang mencukupi tentu akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil wawancara bahwa dalam pengalokasian anggaran, terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya. Kondisi tersebut tentu akan mengurangi kemampuan unit organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud, sehingga berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang berarti tidak mendukung untuk peningkatan kinerja dalam penyerapan anggaran.

Besarnya anggaran seringkali tidak memberi manfaat tersebut ketika dalam pelaksanaannya tidak dapat direalisasikan secara optimal. Rendahnya kinerja penyerapan anggaran senantiasa menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Meskipun anggaran pendapatan dan belanja terus mengalami peningkatan, pada setiap perhitungan anggaran hampir selalu terjadi SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Evaluasi kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA, serta menemukan berbagai faktor kendala dalam pelaksanaan anggaran yang kemudian diikuti dengan pemberian rekomendasi yang dapat digunakan secara tepat untuk mengatasi berbagai faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara rutin sehingga dapat memberi rekomendasi secara lebih dini demi meningkatkan pencapaian kinerja suatu organisasi.

1. Persiapan Evaluasi Kinerja

Langkah persiapan evaluasi merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tahapan selanjutnya dari proses evaluasi, karena persiapan merupakan perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam proses evaluasi kinerja anggaran. Tanpa persiapan yang tepat maka dapat dikatakan bahwa kegiatan evaluasi akan bergerak tanpa arah yang jelas.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa proses persiapan evaluasi kinerja anggaran pada Pemda Kabupaten Aceh Singkil telah dapat memberikan arah yang jelas dari kegiatan evaluasi. Persiapan yang dilakukan adalah terhadap proses evaluasi, data dan sumber data, waktu pelaksanaan evaluasi. Semua hal-hal teknis yang harus dilakukan ditetapkan secara rinci sehingga semua pihak dapat memahaminya dengan mudah tanpa adanya salah tafsir. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa persiapan yang dilakukan telah cukup mendukung

dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dari proses evaluasi karena keberhasilan evaluasi sangat tergantung pada ketersediaan data secara tepat waktu. Terdapat banyak masalah dimana data diperoleh tidak menggambarkan kondisi lapangan yang paling akhir, sehingga proses analisis menjadi menyesatkan. Artinya bahwa data yang dibutuhkan tidak dapat tersedia secara tepat waktu.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dalam evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa terdapat kegiatan yang belum selesai tetapi belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi. Keadaan tersebut menyebabkan kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang dikumpulkan dengan kondisi kinerja yang sebenarnya, sehingga kurang mendukung dalam proses evaluasi kinerja anggaran.

Data yang dikumpulkan dalam proses evaluasi sudah tergolong sah, karena data tersebut dapat diverifikasi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bukti yang diterima bagian administrasi telah terlebih dahulu diperiksa dengan baik sebelum dibukukan, sehingga bukti-bukti tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran terhadap kinerja merupakan tahapan untuk menentukan pencapaian kinerja anggaran. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terhadap target yang harus dicapai pada setiap waktu. Dalam banyak hal, tinggi rendahnya kinerja dari anggaran tersebut sangat tergantung pada hasil pengukuran yang dilakukan. Pengukuran yang dilakukan harus dapat menggambarkan capaian hasil kerja organisasi.

Pengukuran terhadap kinerja merupakan tahapan untuk menentukan pencapaian kinerja anggaran. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi terhadap target yang harus dicapai pada setiap waktu. Dalam banyak hal, tinggi rendahnya kinerja dari anggaran tersebut sangat tergantung pada hasil pengukuran yang dilakukan. Pengukuran yang dilakukan harus dapat menggambarkan capaian hasil kerja organisasi.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah dapat menggambarkan hasil kerja atau kinerja organisasi yang sesungguhnya, tetapi hal tersebut masih sangat dipengaruhi oleh kebenaran data yang diperoleh. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan membandingkan realisasi terhadap target atau anggarannya, sehingga kemungkinan kekeliruan dalam pengukuran tergolong kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil telah dapat

menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya, sehingga cukup mendukung dalam peningkatan kinerja.

4. Analisis Kinerja

Tahapan paling akhir dari proses evaluasi kinerja adalah analisis terhadap data, hasil pengukuran dan penilaian. Analisis tersebut terutama bertujuan untuk mengungkapkan ketidakberhasilan serta faktor-faktor kendala yang menjadi penyebab ketidakberhasilan mencapai kinerja, yang kemudian diakhiri dengan pemberian rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pada proses pelaksanaan selanjutnya.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa proses analisis kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mengidentifikasi faktor penyebab kurang berhasilnya pencapaian kinerja. Proses identifikasi kendala cukup mudah dilakukan terutama jika hal tersebut bersumber dari internal. Namun demikian menurut hasil wawancara bahwa sebagian besar kendala yang diidentifikasi justru bersumber dari eksternal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses analisis telah berhasil mengidentifikasi kendala pencapaian kinerja, sehingga cukup mendukung dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran.

Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Perencanaan dan Evaluasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Faktor Kendala Perencanaan Anggaran

Sebelumnya telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengalokasian anggaran, terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya. Kondisi tersebut tentu akan mengurangi kemampuan unit organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud, sehingga pelaksana kegiatan menjadi kurang bersemangat untuk segera melaksanakan kegiatan, sehingga berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang berarti akan menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terlambat. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk mengalokasikan anggaran dengan menggunakan perhitungan yang matang sebagaimana telah diajukan oleh unit organisasi pelaksana kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat waktu tanpa perlu harus melakukan penundaan hingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terlambat. Setiap pengajuan anggaran kegiatan tentu telah didasarkan pada kondisi lapangan, sehingga jumlah yang diajukan seharusnya sudah menggambarkan teknis pelaksanaan serta kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan. Dengan demikian setiap pengurangan alokasi anggaran akan menyebabkan pelaksana kegiatan harus merencanakan kembali teknis pelaksanaannya, yang berarti akan berpotensi menunda pelaksanaan kegiatan, yang pada gilirannya juga akan menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terlambat.

b. Tidak terdapat perencanaan yang memadai terhadap kebutuhan uang persediaan untuk periode satu bulan, sehingga sering menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Tanpa adanya perencanaan uang persediaan maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan uang persediaan dari masing-masing unit organisasi pada saat dibutuhkan, sehingga berpotensi untuk menunda pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut tentu akan mengurangi penyerapan anggaran. Oleh karena itu, uang persediaan sebaiknya direncanakan paling tidak untuk kebutuhan periode sebelumnya, sehingga jumlah yang disediakan pada periode setiap bulan benar-benar dapat menggambarkan jumlah yang akan dibutuhkan, sehingga tidak ada kegiatan yang tertunda karena kurangnya persediaan uang tunai.

2. Faktor Kendala Evaluasi Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja. Adapun faktor kendala dalam evaluasi kinerja sehingga kurang mendukung peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Data yang dikumpulkan dalam evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa terdapat kegiatan yang belum selesai tetapi belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi. Keadaan tersebut menyebabkan kemungkinan terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang dikumpulkan dengan kondisi kinerja yang sebenarnya, sehingga kurang mendukung dalam proses evaluasi kinerja anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu diupayakan agar semua pegawai secara disiplin menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan serta bukti-bukti pendukungnya, terutama menjelang evaluasi kinerja akan dilaksanakan. Dengan demikian maka data yang diperoleh dari bagian administrasi benar-benar menunjukkan kondisi yang paling akhir.

b. Proses evaluasi kinerja tidak selalu berhasil memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan anggaran. Keadaan tersebut disebabkan terdapat banyak kendala justru bersumber dari eksternal yang berada di luar pengendalian unit organisasi, sehingga upaya untuk mengatasinya sering sulit untuk ditemukan. Upaya akhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala adalah mencari jalan pintas demi menyelamatkan kegiatan yang sudah dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi kinerja belum sepenuhnya dapat memberi rekomendasi untuk mengatasi kendala, sehingga kurang mendukung dalam peningkatan kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pegawai yang menangani program perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pihak eksternal, terutama pihak yang menjadi sumber kendala pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian proses negosiasi tersebut diharapkan akan mendapatkan titik temu antara pelaksana anggaran pihak eksternal.

SIMPULAN

Perencanaan dan evaluasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja anggaran, terutama perencanaan keuangan, pengumpulan data yang paling akhir untuk evaluasi kinerja serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan anggaran. Faktor kendala dalam perencanaan adalah terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya, dan kebutuhan uang persediaan untuk periode satu bulan tidak direncanakan dengan baik. Sedangkan faktor kendala dalam evaluasi kinerja, data atau informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa tahapan kegiatan yang dilaksanakan belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi. Evaluasi kinerja tidak selalu berhasil memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan anggaran. Keadaan tersebut disebabkan terdapat banyak kendala justru bersumber dari eksternal yang berada di luar pengendalian unit organisasi, sehingga upaya untuk mengatasinya sering sulit untuk ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2013. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Angkat, K.M., Abdul K., Isnaini, (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 33-48
- Astari, Suci. 2019. *Strategi Dinas Koperasidan UKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. UINSU: Medan.
- Bariun, 2015. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.6 No.4.
- Bastian, Indra. 2008. *Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Daulay, S., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 49-56. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Harahap, A.S., & Angelia, N., (2019), Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 29-42
- Harjanto. 2008. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Herriyanto, Hendris. 2012. Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Depok: FE UI.
- Huda. 2012. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jaffisa, T., Abdul K., Dumasari H., (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 94-93
- Kunarjo. 2012. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.
- Kuncoro, M. 2013. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.
- Lubis, E.Z., (2017), Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 107-116.

- Mahmudin. 2010. Membudidayakan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahpudin, Endang. 2017. Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah. JRKA Volume 3 Isue 2, Agustus 2017.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraha, 2010. Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Pangalila, Chelsea. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).
- Pasi, N., Abdul K., Isnaini, (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 7 (1): 49-63
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal. 8 (1): 108-123.
- Rahayu. 2011. Penganggaran Sektor Publik. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Retnami, 2008. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal. Akuntansi Pemerintahan 2(1): 53-64.
- Salbiah dan Ridha Rizky. 2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sarundajang, S.H. 2012. Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Seftianova dan Adam, 2013
- Seftianova, Ratih dan Helmy Adam. 2013. Pengaruh kualitas dipa dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker Wilayah KPPN Malang. Jurnal JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013.
- Sriharioto, 2012. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Subiyantoro, Yohanes Y. 2011. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 2 (2): 166-175
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Trisna, W., Ridho M., (2017), Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal, 7 (1): 117-126.
- Turnip, K. (2016). *Prokontra dan Resistensi ICT/E-Gov: Perspektif Prikologi Birokrasi*. Yogyakarta: Almatara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Widjaja, HAW. 2007. Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.